BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan proses pembelajaran yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh informasi dan mengembangkan potensi diri, serta dapat menjadi manusia yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Pendidikan juga merupakan sumber kemajuan bangsa yang akan sangat menentukan kualitas dan daya saing bangsanya. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 BAB I Pasal 1 Ayat 1 menerangkan bahwa "*Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, Masyarakat, bangsa dan negara*."

Berbicara tentang dunia pendidikan tentu akan erat kaitannya dengan lembaga Pendidikan. Menurut Gazali (2013) Lembaga Pendidikan berfungsi sebagai wadah untuk membina manusia sehingga membawa mereka ke arah yang lebih baik. Di Indonesia lembaga pendidikan terbagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari lembaga pendidikan formal, informal dan non formal (Huda, 2020). Lembaga pendidikan formal terbagi menjadi beberapa jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi (Bafadhol, 2017)

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada setiap jenjang pendidikan formal diatur oleh kurikulum yang ditetapkan oleh kementerian pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional bahwa "*Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu*". Kementerian Pendidikan dalam menjalankan tugasnya menghadirkan sistem pendidikan yang beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Salah satu bentuk usaha dari adaptasi dengan perkembangan zaman adalah dengan hadirnya perubahan kurikulum. Selama dua puluh tahun terakhir sejak tahun 2004 terdapat empat kali perubahan kurikulum, mulai dari KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) yang diluncurkan pada 2004, dilanjutkan dengan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) pada 2006, dan terakhir perubahan dari Kurikulum 2013 menuju Kurikulum Merdeka yang baru diluncurkan 2022 lalu. Julaeha dkk (2021) menyatakan bahwa alasan pergantian kurikulum tentu ditujukan untuk perbaikan kualitas pendidikan yang lebih baik dan memastikan sistem pendidikan dapat merespon kebutuhan dan tuntutan perkembangan zaman. Sedangkan menurut Ningrum (2022) perubahan kurikulum terjadi untuk menyesuaikan permintaan pasar dan menyiapkan sumber daya manusia yang terampil dan berpengetahuan luas sejak dini.

Kurikulum Merdeka adalah pendekatan kurikulum terbaru yang diperkenalkan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Kurniati et al, (2022) menyatakan bahwa Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang didasarkan pada *project* siswa dan pendekatan strategis yang berorientasi pada kegiatan yang digarap langsung oleh siswa. Menurut Khoirurrijal dkk (2022) Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang pembelajarannya beragam dan perlu dikemas lebih

menarik agar siswa lebih memahami konsep dan meningkatkan kemampuan berpikirnya. Pendekatan Kurikulum Merdeka menekankan pada pemberdayaan guru dan siswa untuk mempelajari dan mengembangkan diri secara mandiri, serta mendorong fleksibilitas, kreativitas, inisiatif, dan otonomi dalam proses pembelajaran (Rambung dkk, 2023).

Berbagai jenjang pendidikan harus segera mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah masing-masing (Angga dkk, 2022). Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) melalui *website* resmi kementrian (http://kurikulum.kemendikbud.go.id) menetapkan lebih dari 140 ribu satuan pendidikan harus menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022/2023. Salah satu jenjang pendidikan yang sudah mulai menerapkan Kurikulum Merdeka adalah Sekolah Menengah Atas (SMA). Data yang diambil dari kemendikbud pada Bulan Mei 2024, terdapat 12.556 satuan pendidikan SMA yang sudah menerapkan Kurikulum Merdeka secara nasional, sedangkan untuk tingkat Provinsi Sumatera Barat sebanyak 315 dari total 541 satuan pendidikan sudah menerapkan kurikulum terbaru ini, atau sekitar 58 persen.

Jenjang pendidikan SMA adalah yang paling besar merasakan dampak perubahan kurikulum (Mulyasa, 2023). Hal ini karena banyak perubahan yang diadaptasi oleh SMA, mulai dari metode pengajaran, prinsip pembelajaran, sistem administrasi, sistem evaluasi dan sebagainya. Salah satu hal paling dasar yang memberikan dampak adalah pendekatan proses belajar mengajar yang berubah menjadi pembelajaran berdiferensiasi (Sarnoto, 2024). Zulkifli Anas yang menjabat sebagai Plt. Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, menyatakan bahwa urgensi

pembelajaran berdiferensiasi adalah terletak pada penyesuaian kemampuan dan kebutuhan peserta didik dengan pengajaran yang diberikan. Melalui pendekatan ini Kurikulum Merdeka diharapkan dapat memberikan ruang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minatnya (Rahmadhani, 2022).

Pembaharuan Kurikulum Merdeka juga terletak pada materi yang diajarkan, yang berfokus pada proses belajar dan esensinya, bukan lagi pada pemahaman konsep dan kognitif semata (Ardianti & Amalia 2022). Salah satunya adalah dengan pengembangan karakter dari Kurikulum 2013 ditekankan kembali dengan cara yang berbeda, yaitu berbasis *project* yang menurut Zulaiha, dkk (2023) akan meningkatkan partisipasi peserta didik secara signifikan. Salah satu pembelajaran berbasis *project* adalah program P5 (Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila) yang memberikan kesempatan peserta didik untuk mendapatkan pengalaman belajar langsung dengan lingkungan sekitarnya.

Kurikulum Merdeka juga memberikan fleksibilitas kepada sekolah dalam merancang kurikulum operasionalnya sesuai dengan kondisi dan situasi sekolah masing-masing yang disebut dengan Kurikukum Operasional Satuan Pendidikan atau disingkat dengan KOSP (Fitriyah & Wardani, 2022). Fleksibilitas pada Kurikulum Merdeka juga diberlakukan kepada guru yang diminta untuk memodifikasi metode ajar sedemikian rupa untuk menyesuaikan dengan kondisi peserta didik di lapangan. Guru juga harus memahami pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, mengubah materi ajar yang berfokus pada esensi dan tuntutan kreatifitas dalam menyusun metode ajar yang sesuai dengan kemampuan peserta didik menjadi beban tambahan bagi para guru. Menurut Aminah dan Nursikin

(2023) beban tambahan pada guru menempatkan guru pada posisi yang memiliki tanggung jawab lebih dalam memahami, menilai dan menyesuaikan pola dan perbedaan gaya belajar peserta didik.

Guru sebagai subjek utama penggerak roda pendidikan di sekolah memiliki beban dan tanggung jawab dalam memahami dan menjalankan kurikulum dengan baik. Oleh karena itu proses implementasi Kurikulum Merdeka menempatkan peran guru sebagai fasilitator yang memberdayakan siswa untuk mengambil inisiatif dan mengendalikan proses pembelajaran mereka sendiri di kelas. Hal ini sesuai dengan pendapat Darman (2020) bahwa guru atau tenaga pendidik menjadi penentu apakah implementasi kurikulum dapat berjalan dengan baik atau tidak di lembaga pendidikan terkait.

Menghadapi tantangan dalam implementasi kurikulum terbaru, guru memiliki beban untuk menjalankan perannya dalam beradaptasi dengan segala aspek perubahan kurikulum (Suhandi & Robi'ah, 2022). Maka penting untuk melihat bagaimana kendala yang dihadapi oleh guru sebagai subjek utama. Beberapa fenomena dan permasalahan yang dihadapi guru di sekolah dijelaskan oleh Harianto (2023) sangat beragam, diantaranya; kesulitan beradaptasi dengan perubahan paradigma pembelajaran, kurangnya informasi terkait konten kurikulum terbaru, ketertebatasan sumber daya, bertambahnya beban administrasi dan ketidaksiapan guru untuk bertransformasi. Masalah-masalah ini tentu menjadi penghalang bagi terwujudnya implementasi kurikulum yang baik di sekolah.

Hal ini sesuai dengan hasil survey pada Bulan November 2023 yang diberikan kepada 100 orang guru SMA di Kota Payakumbuh, lebih dari 30 orang menyatakan bahwa mereka merasa terbebani dengan implementasi kurikukum terbaru. 22 orang diantaranya menyatakan bahwa masih sangat membutuhkan bimbingan teknis, loka karya atau seminar yang bertajuk Kurikulum Merdeka. Sedangkan 4 orang merasa perlu pemahaman seputar pembaharuan metode ajar dan peningkatan kreatifitas guru dalam mengelola kelas.

Sejalan dengan beberapa wawancara yang dilakukan kepada kurang lebih 25 orang guru SMA Kota Payakumbuh pada Mei 2023, didapati juga beberapa fenomena di lapangan tentang kesuiltan guru dalam beradaptasi dengan segala tuntutan pembaharuan kurikulum di sekolah. Beberapa diantara mereka menyatakan kendala dari berbagai sisi, mulai dari administrasi, kesulitan dalam mempelajari materi dan metode ajar baru, sampai kesulitan dalam mengarahkan siswa untuk mengelola berbagai *project*. Sedangkan perubahan kurikulum harus ditunjang oleh guru yang menguasai substansi kurikulum, yang menyangkut kompetensi profesional dan pedagogik, khususnya terkait materi pembelajaran yang harus diolah dalam membentuk karakter dan kompetensi peserta didik untuk membentuk profil pelajar pancasila (Heryahya dkk, 2022).

Tanggung jawab dan beban guru tentu harus di seimbangkan dengan sumber daya yang memadai, baik lingkungan fisik maupun non fisik. Sayangnya dalam menghadapi kebutuhan sumber daya, tidak semua sekolah memiliki akses yang memadai. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Febrianingsih dan Ramadan (2023) bahwa keterbatasan infrastruktur dan fasilitas teknologi dapat

menghambat implementasi Kurikulum Merdeka oleh para guru. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan kelengkapan sumber daya, karena akan menjadi salah satu kunci dalam optimalisasi implementasi Kurikulum Merdeka. Maka tidak dipungkiri bahwa lingkungan fisik akan sangat mempengaruhi kinerja guru (Ihsan, 2022).

Berbicara mengenai sumberdaya non fisik, dibutuhkan optimalisasi peran pemerintah dalam bentuk moril maupun materil. Menurut Rizaldi dan Fatimah (2023) kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk keberhasilan implementasi kebijakan baru, termasuk Kurikulum Merdeka. Pemerintah dalam hal ini adalah bagian dari dukungan eksternal yang akan mendorong kesiapan guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Sedangkan menurut Safitri (2023) dukungan pemerintah dalam implementasi Kurikulum Merdeka diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif.

Sedangkan di satu sisi banyak guru yang masih belum terbiasa menggunakan perangkat teknologi, terlebih lagi dipadukan dengan tuntutan untuk pengaplikasian langsung pada saat proses pembelajaran. Hal ini ditunjukkan dengan hasil survey yang diberikan kepada 100 orang guru SMA Kota Payakumbuh pada Bulan November 2023 dengan hasil yang cukup mengejutkan, lebih dari 50 orang guru bahkan belum bisa menyiapkan *slide power point* dengan baik. Belum lagi untuk metode ajar, guru senior sudah terbiasa dengan metode ajar yang konvensional dan sulit menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi (Mulyasa, 2021).

Hasil survey yang disebar kepada guru SMA Kota Payakumbuh pada November 2023 ini juga menyebutkan bahwa banyak guru yang merasa beban untuk beradaptasi dengan kurikulum tidak ditunjang dengan dukungan yang sesuai. Baik dukungan materil maupun moril dari sekolah dan pemerintah. Keberhasilan dalam mengimplementasikan kurikulum sebenarnya bergantung pada kesiapan individu yang dievaluasi secara berkala, dalam hal ini tentu yang dimaskud adalah guru. Menurut Armenakis dkk (1993) menjelaskan bahwa kesiapan individu adalah keyakinan, perilaku dan intensi seseorang terhadap perubahan. Sejalan dengan Armenakis, Holt dkk (2007) menambahkan bahwa kesiapan individu untuk berubah adalah seberapa individu secara kognitif dan emosional menunjukkan penerimaan dan usaha untuk melaksanakan rencana perubahan.

Penjelasan dari dua ahli di atas menunjukkan bahwa kesiapan dan keyakinan individu dari segi kognitif dan emosional sebagai sebuah sikap mental adalah hal utama yang akan menunjang besar perubahan. Setiap guru tentu memiliki latar belakang dan karakteristik yang berbeda-beda, oleh karena itu sejalan dengan pendapat Susanti dkk (2023) yang menyatakan bahwa penting bagi guru untuk memiliki sikap mental yang meyakini dirinya memiliki kompetensi dan otonomi diri yang baik serta peka terhadap lingkungan sosialnya. Sikap mental ini sesuai dengan aspek yang disusun dalam teori Ryan dan Deci (2000) tentang *self determination* yang menjelaskan bahwa determinasi diri merupakan kemampuan seseorang untuk mengarahlan perilaku dan tindakan mereka sendiri untuk mencapai suatu tujuan dengan baik.

Teori Determinasi Diri (SDT) mengidentifikasi tiga kebutuhan dasar yang jika dipenuhi akan dapat mengoptimalkan pengembangan diri seseorang dan produktivitas (Khumaeroh, 2016). *Self determination* menurut Ryan & Deci (2017) mencakup tiga kebutuhan psikologis dasar yakni kebutuhan otonomi, kompetensi, dan keterkaitan. Guru dalam konteks implementasi Kurikulum Merdeka perlu memenuhi tiga kebutuhan ini agar dapat mengoptimalisasikan perannya sebagai guru dengan baik. Terutama soal kebutuhan untuk memiliki kompetensi diri yang baik sebagai guru profesional yang sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Lestari dkk (2023) bahwa guru perlu memiliki kompetensi profesional dan pedagogik guru dalam menjalankan tugasnya.

Sedangkan untuk aspek otonomi, hal ini sangat sesuai dengan prinsip dan hakikat yang dijunjung tinggi oleh Kurikulum Merdeka, yaitu kemandirian dan fleksibilitas (Vidieyanti dkk, 2023). Seorang guru dituntut untuk mandiri dalam mengelola kelas dan fleksibel dalam menentukan metode ajar serta mampu fleksibel dalam beradaptasi dengan KOSP yang telah ditetapakan oleh sekolah dan menerjemahkannya ke dalam bentuk rancangan pembelajaran maupun pembelajaran berbasis projek yang ada di sekolah (Hattarina dkk, 2022).

Begitu juga dengan aspek keterkaitan, guru dinilai perlu untuk saling terkait dengan lingkungan sosialnya, terutama keterkaitan dengan sesama guru atau tenaga ajar yang ada di sekolahnya masing-masing. Sejalan dengan pendapat Khansa dan Priyanti (2023) yang bependapat bahwa keterkaitan antar guru melalui berbagai komunitas akan meningkatkan kemampuan pedagogik dan kompetensi guru secara berkala. Artinya hubungan sosial yang dibangun oleh

para guru, maka akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan kemampuan profesional yang dimilikinya.

Ketika seorang guru memiliki kompetensi yang baik, mandiri dan fleksibel serta memiliki hubungan sosial yang baik, maka bisa dikatakan ia memenuhi ketiga aspek untuk memiliki kemampuan *self determination* yang baik. Guru yang memiliki kemampuan *self determination* yang baik adalah tanda bahwa ia memiliki motivasi yang baik pula (Mamahit & Situmorang 2017). Ketika guru yang mengajar memiliki dorongan untuk memberikan pelayanan yang baik dalam pembelajaran kepada siswa, maka akan lebih siap menerima hal baru dan memberikan dampak positif untuk hasil belajarnya (Mustiko dan Trisnawati, 2021).

Siswa menghabiskan sebagian besar waktunya selama di sekolah dengan berinteraksi dengan guru atau tenaga ajar. Maka kemampuan *self determination* guru juga dianggap penting karena hal ini dapat berdampak pada siswa secara langsung. Menurut Vansteenkiste dan Ryan (2013) Interaksi yang dibangun oleh guru dengan siswa di kelas merupakan sesuatu yang paling memiliki potensi untuk mempengaruhi motivasi intrinsik siswa. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Reeve (2009) yang menyatakan bahwa *self determination* guru dapat mendorong siswa untuk mengembangkan rasa otonomi dan kemandirian, yang mana kompetensi ini sangat ditekankan dalam pengimplementasian Kurikulum Merdeka.

Menurut Zulkarnaen dan Ruli (2023) kemampuan *self determination* guru akan berbanding lurus dengan kemampuan *self determination* siswa, karena guru

akan memberikan ruang bagi siswa untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas proses dan hasil pembelajaran mereka sendiri. Tidak hanya itu, kemampuan guru dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka juga membutuhkan tingkat *self-determination* yang tinggi. Guru perlu memiliki keyakinan akan kemampuan mereka untuk mengatasi perubahan, mengambil risiko, dan mengembangkan strategi pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. (Vallerand et al., 2008).

Guru dengan kemampuan *self-determination* yang baik akan memiliki kemauan yang tinggi dalam meningkatkan kemampuan profesionalisme mereka, karena mereka telah termotivasi secara intrinsik. Mereka akan melihat tantangan menjadi kesempatan untuk tumbuh dan mengembangkan kompetensi mereka sebagai pendidik (Deci & Ryan, 2002). Begitu juga dengan guru yang memiliki tanggung jawab dalam mengoptimalkan segala usahanya dalam usaha agar dapat produktif dan optimal menghadapi segala beban kerja yang diemban sebagai seorang guru. Maka akan penting melihat gambaran *self determination* guru SMA yang mengajar di Sekolah yang sedang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.

Menurut sudut pandang Teori Determinasi Diri (SDT) bagaimana interaksi individu dengan lingkungan sosialnya sangat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan psikologi dalam diri. Konteks sosial yang dimaksud adalah keluarga, teman sebaya, rekan kerja dan lain sebagainya yang dapat memberikan kesempatan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan psikologi tersebut (Ryan & Deci, 2017a).

Bagaimana merubah rasa minder menjadi motivasi untuk perbaikan diri dan meningkatkan kinerja pribadi dirasa sangat penting untuk diteliti.

Oleh karena itu dalam rangka mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang *self determination* guru SMA yang mengajar di Sekolah yang menerapkan Kurikulum Merdeka, penelitian yang melibatkan pengumpulan data langsung dari para guru perlu dilakukan. Penelitian ini akan memberikan gambaran bagaimana tingkat *self determination* guru yang mengajar di sekolah yang sedang menerapkan Kurikulum Merdeka tingkat SMA di Kota Payakumbuh. Hal ini akan harapannya akan memberikan gambaran *self determination* guru SMA yang memiliki implikasi penting dalam pembelajaran Kurikulum Merdeka.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, dapat disimpulkan rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Gambaran *Self Determination* Guru SMA dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Gambaran *Self Determination* Guru SMA dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini :

1. Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan partisipasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang Psikologi Pendidikan.
2. Sebagai sumber informasi, sehingga bisa dijadikan sebagai pedoman untuk penelitian berikutnya dengan tema yang linear, terutama Kurikulum Merdeka.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sebagai sumbangsih pemikiran untuk masyarakat, terkhusus pada para guru yang sedang beradaptasi dengan kurikulum terbaru yaitu Kurikulum Merdeka, dan agar dapat meningkatkan motivasi intrinsiknya dengan memaksimalkan kemampuan *self determination,* terutama bagi guru.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA